

P-ISSN: 1858-2168
E-ISSN: 2621-251X

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

VOLUME XIX NOMOR 1 JUNI 2023

Penanggung Jawab:

Dr. Andi Taufik, M. Si

Redaktur/Journal Editor:

Anita, S. Sos., M. Si

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Abdul Mahsyar, M. Si

Prof. Dr. Haedar Akib, M. Si

Prof. Dr. Nurliah Nurdin., MA

Dr. Firdaus Muhammad, M.Si

Dr. Asropi S. IP, M. Si

Dr. Hayat, S.A.P., M.Si

Dr. Bevaola Kusumasari, M. Si

Dr. Rulinawaty, S. Sos., M. Si

Dr. St. Syamsudduha, M. Pd

Dr. Puji Lestari, M. Si

Editor:

Dr. Frida Chairunisa, M. Si

Dr. Halim, SH., MH

Dr. Johan Tarru Mada, M. Si

Milawaty, SS, MM

Syakib Arsalan, SH.I, LL.M

Penyunting/Section Editor:

Zaenal Z., S. Sos., M. Adm. Pemb.

Satria Eka Tri Laksana, S.IP

Copy Editor & Layout Editor:

Avrina Dwijayanti, S. IP.

Ayun Sri Damayanti, SH., MH

Nur Khasanah Latief, S. IP

Carmelia, S.E

St. Aflaha, S.E.

Desain Grafis:

Muhammad Iqbal, S. Sos., MA

Volume XIX Nomor 1 Juni 2023

JURNAL
**ADMINISTRASI
PUBLIK**
PUSLATBANG KMP LAN RI

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan
Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KMP LAN)
Jl. Raya Baruga No. 48 Makassar, 90234
E-mail: jap@lan.go.id | URL: <http://makassar.lan.go.id/jap>

CALL FOR PAPER:

Redaksi menerima naskah hasil penelitian, analisis, kajian, pemikiran kritis, dan gagasan ilmiah dalam lingkup bidang administrasi publik yang belum diterbitkan di jurnal ilmiah lainnya. Naskah hendaknya diketik dalam MS Word menggunakan Bahasa Indonesia sepanjang 6000-8000 kata, ukuran A4, huruf Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5. Abstrak ditulis dalam dwi bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) masing-masing sepanjang 100-200 kata. Naskah di-submit ke [http: <http://makassar.lan.go.id/jap>](http://makassar.lan.go.id/jap) atau dikirim melalui email ke Redaksi dalam bentuk soft file copy. Redaksi berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi akan di-review oleh Mitra Bestari (*Reviewer*).



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2023

JURNAL
**ADMINISTRASI
PUBLIK**
PUSLATBANG KMP LAN RI

Volume XIX Nomor 1 Juni 2023
Hal. 1-192

-
- | | |
|---|---------|
| 1. EFEKTIVITAS PROGRAM LAYANAN DARURAT 112 DALAM PENANGGULANGAN KEJADIAN GAWAT DARURAT
Noor Shifa Banon, Arenawati, Listyaningsih | 1-25 |
| 2. ANALISIS TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN PUBLIK PERTANAHAN: HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
Kurnia Rheza Randy Adinegoro | 26-49 |
| 3. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKKAN DISIPLIN ASN STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
Amin Irmawan | 50-84 |
| 4. AGILE GOVERNANCE PADA REFORMASI BIROKRASI 4.0 DI PUSLATBANG KMP LAN KOTA MAKASSAR
Ihyani Malik, Nur Wahid, Busri | 85-119 |
| 5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 BAGI LANJUT USIA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA CILEGON
Ratna Siti Tursina, Oman Supriadi, Ipah Ema Jumiaty | 120-145 |
| 6. KINERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUSKEMAS
Dewi Sulfa Saguni, Widyawati, Muhammad Hidayat Djabbari | 146-164 |
| 7. MANAJEMEN KOMUNIKASI PROGRAM VAKSINASI COVID-19 SEBAGAI WUJUD KETERBUKAAN INFORMASI OLEH HUMAS POLDA PROVINSI SULAWESI TENGAH
Fadhlihah, Rizqy Alfiyaty, Kudratullah | 165-192 |

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

P-ISSN: 1858-2168

E-ISSN: 2621-251X

Volume XIX Nomor 1 Juni 2023

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik berhasil memperoleh Akreditasi Sinta 4 sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih kepada seluruh pembaca, mitra bestari, maupun penulis yang telah berkontribusi mengirimkan tulisan kepada redaksi.

Pada edisi ini, Jurnal Administrasi Publik menghadirkan 7 artikel yang secara keseluruhan merupakan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik. Tulisan pertama ditulis oleh Noor Shifa Banon, Arenawati, Listyaningsih dengan judul “Efektivitas Program Layanan Darurat 112 Dalam Penanggulangan Kejadian Gawat Darurat”. Tulisan kedua berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Rheza Randy Adinegoro yang bertajuk “Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang”. Tulisan ketiga dihadirkan oleh Amin Irmawan dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakkan Disiplin ASN Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi”. Tulisan keempat ditulis oleh Ihyani Malik, Nur Wahid, Busri yang diberi tajuk “*Agile Governance* pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar”. Dalam tulisan kelima, Ratna Siti Tursina, Oman Supriadi, Ipah Ema Jumiati mencoba menuliskan hasil penelitiannya mengenai “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lanjut Usia Dalam Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kota Cilegon”. Tulisan keenam dihadirkan oleh Dewi Sulfa Saguni, Widyawati, Muhammad Hidayat Djabbari yang mengambil judul “Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Puskemas”. Adapun tulisan ketujuh, ditulis oleh Fadhliah, Rizqy Alfiyaty, Kudratullah dengan judul “Pengelolaan Program Vaksinasi Covid-19 oleh Humas Polda Provinsi Sulawesi Tengah”.

Redaksi Jurnal Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah bersedia mengirimkan naskahnya kepada kami. Tidak lupa kami mengundang pembaca untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan yang dimiliki untuk Jurnal Administrasi Publik edisi selanjutnya.

Semoga setiap tulisan yang ada di dalam jurnal edisi ini dapat menjadi motivasi, sumbangan ide, serta tambahan ilmu bagi seluruh pembaca. Salam inovasi.

Redaksi

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

P-ISSN: 1858-2168

E-ISSN: 2621-251X

Volume XIX Nomor 1 Juni 2023

Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa izin dan biaya

Noor Shifa Banon, Arenawati, Listyaningsih

Efektivitas Program Layanan Darurat 112 Dalam Penanggulangan Kejadian Gawat Darurat

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 Juni 2023, Hal. 1-25

Program Layanan Darurat 112 merupakan upaya pemerintah daerah Kota Cilegon dalam membantu percepatan penanggulangan kejadian gawat darurat yang dialami oleh masyarakat di wilayah Kota Cilegon. Melihat dari potensi kebencanaan wilayah seperti bencana alam, non-alam, dan sosial yang dapat terjadi di Kota Cilegon, maka urgensi program Layanan Darurat 112 cukup tinggi untuk dilaksanakan secara efektif. Meskipun urgensi program Layanan Darurat 112 tinggi, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang terjadi. Penelitian ini akan menjelaskan seberapa besar tingkat efektivitas program Layanan Darurat 112 dalam penanggulangan kejadian gawat darurat di wilayah Kota Cilegon menggunakan alat analisa model efektivitas program kegawatdaruratan Budiani dengan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Layanan Darurat 112 sudah berjalan efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 80.08%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengukuran indikator ketepatan kelompok sasaran program telah mencapai kategori sangat efektif, pemahaman kelompok target program telah mencapai kategori sangat efektif, ketercapaian tujuan program telah mencapai kategori efektif, dan tindaklanjut program telah mencapai kategori efektif.

Kata kunci: Efektivitas Program; 112; Gawat Darurat; Call Center; Bencana.

Kurnia Rheza Randy Adinegoro

Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 Juni 2023, Hal. 26-49

Perkembangan teknologi dan sistem komunikasi di dunia saat ini berkembang secara pesat. Kemajuan teknologi ini membawa berbagai dampak perubahan. Segala sektor dalam kehidupan mulai tersentuh transformasi digital, baik di sektor privat maupun sektor publik. Salah satu penyelenggara layanan sektor publik di bidang Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merespon positif transformasi

digital. Hal itu diwujudkan dengan mentransformasi layanan pertanahan salah satunya dengan transformasi Pendaftaran Hak Tanggungan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional ditransformasi menjadi secara elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif, metode ini diharap dapat mendiskrisikan suatu sudut pandang dari konstruksi realita yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini mendiskripsikan bagaimana perubahan Hak Tanggungan yang mulanya pendaftaran dilakukan secara konvensional ditransformasikan menjadi secara elektronik. Mencoba memberikan gambaran perbedaan dari cara mendaftar sampai dengan output yang diterima dalam bentuk sertipikat Hak Tanggungan. Selain itu juga mencoba menganalisa perubahan layanan publik pertanahan ini dengan dimensi kualitas layanan menggunakan pendekatan E-S-Qual dan E-Recs-Qual. Model E-S-Qual diantaranya variabel Efficiency, System Availability, Fulfillment, Privacy. Serta 3 dimensi dari E-Recs-Qual yakni Responsiveness, Compensation, dan Contact.

Kata kunci: Transformasi Digital, Layanan Publik Pertanahan, Hak Tanggungan, Hak Tanggungan Elektronik, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang

Amin Irmawan

Upaya Pemerintah Daerah dalam Penegakkan Disiplin ASN Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 Juni 2023, Hal. 50-84

Meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah, pelanggaran disiplin dan kode etik oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih sering terjadi di beberapa instansi pemerintah, sehingga hingga saat ini belum teratasi sepenuhnya seperti kasus pelanggaran dan sikap hedonistik oleh oknum Pegawai Negeri Sipil telah mendapat perhatian publik sehingga dapat merusak reputasi institusi dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal tersebut dapat terjadi pada PNS di Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

Penelitian ini difokuskan pada upaya Pemerintah Daerah dalam menegakkan Disiplin dan Kode Etik PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang berkaitan dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Wakatobi pada RPJMD Kabupaten Wakatobi 2021-2026 melalui Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Analisis ini melibatkan tiga komponen utama yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian diperoleh bahwa kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil bukan hanya tanggung jawab pegawai, tetapi juga tanggung jawab organisasi, sehingga organisasi harus menetapkan rencana aksi kebijakan disiplin dan kode etik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yaitu 1) Melakukan pertemuan sosialisasi tentang pengendalian dan pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil, 2) Pemberian contoh yang baik, 3) Memberikan penghargaan dan sanksi, 4) Pelatihan dan pengembangan pegawai, 5) Membuat sistem pengawasan, 6) Pelaporan pelanggaran, 7) Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja pegawai, 8) Membuat sistem evaluasi kinerja.

Kata kunci: Disiplin; Kode Etik; Penegakkan Disiplin; Rencana Aksi; Pegawai Negeri Sipil.

Ihyani Malik, Nur Wahid, Busri

**Agile Governance pada Reformasi Birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN
Kota Makassar**

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 Juni 2023, Hal. 85-119

Organisasi saat ini dihadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks dan dinamis, di mana kecepatan adaptasi dan inovasi menjadi kunci keberhasilan. Di tengah persaingan yang ketat dan perubahan teknologi yang cepat, dibutuhkan pendekatan baru yaitu tata kelola gesit dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Reformasi Birokrasi 4.0 berdasarkan prinsip-prinsip *Agile Governance* di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan LAN Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen yang kemudian data dianalisis serta divisualisasi dengan *software* Nvivo 11 Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip pertama yaitu *good enough governance*; pelaksanaan reformasi birokrasi 4.0 sudah menyesuaikan konteks dan kapabilitas organisasi. Prinsip kedua adalah *business-driven*; pelaksanaan reformasi birokrasi sangat berorientasi pada proses. Prinsip ketiga yaitu *human focused*; reformasi birokrasi sudah melibatkan seluruh pegawai serta peserta pelatihan untuk berkontribusi. Prinsip selanjutnya yaitu *based on Quick wins*; inovasi dan program kegiatan dalam reformasi birokrasi dapat dengan cepat dilakukan dan mencapai target dalam *Quick wins* tahunan. Kemudian *systematic and adaptive approach*; reformasi birokrasi dilakukan secara sistematis, adaptif pada masa pandemi Covid-19, terukur serta dapat dinilai dalam monitoring dan evaluasi. Prinsip terakhir yaitu *simple design and continuous refinement*; pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan secara gesit dan memiliki peningkatan pada 8 area perubahan dengan pemanfaatan teknologi serta penerapan budaya kerja yang dinamis. Reformasi birokrasi dapat menjadi faktor pengungkit menuju tata kelola pemerintahan yang gesit. *Agile Governance* di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar sudah terimplementasi dengan baik berdasar pada prinsip-prinsip *Agile Governance* diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam menghadapi tantangan era digital dan transformasi teknologi.

Kata kunci: Digitalisasi; Pelayanan; Pensiun; Aplikasi Taspen Otentikasi

Ratna Siti Tursina, Oman Supriadi, Ipah Ema Jumiaty

**Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Bagi Lanjut Usia Dalam Upaya
Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kota Cilegon**

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 Juni 2023, Hal. 120-145

Kebijakan vaksinasi merupakan upaya pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19, khususnya bagi kelompok lanjut usia yang rentan terhadap penularan virus Covid-19. Kota Cilegon memiliki jumlah sasaran paling sedikit, namun cakupan vaksinasi Covid-19 bagi lansia di Kota Cilegon masih di bawah target ideal. Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 bagi lansia di Kota Cilegon, dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dan metode penelitian kualitatif. Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 bagi lansia di Kota Cilegon belum berjalan secara optimal. Cakupan vaksinasi Covid-19 bagi lansia

berjalan lambat dan belum mencapai target. Sumber daya belum memadai, karena belum di dukung dengan kelengkapan, ketersediaan ruang pelayanan vaksin, dan pemeliharaan kualitas vaksin Covid-19. Keterlibatan tokoh agama sebagai stakeholders belum merata. Sikap Kecenderungan Para Pelaksana masih kurang, dilihat dari kedisiplinan tenaga pelaksana dalam pelaporan. Kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Cilegon dan Puskesmas, serta pada aspek lingkungan belum optimalnya upaya pelayanan dengan sistem jemput bola seperti *door-to-door* vaksinasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Vaksinasi Covid-19, Lansia.

Dewi Sulfa Saguni, Widyawati, Muhammad Hidayat Djabbari
Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Puskesmas

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 Juni 2023, Hal. 146-164

Kualitas pelayanan puskesmas pasca pandemic covid 19 masih menjadi sorotan, hal ini dikarenakan puskesmas merupakan garda terdepan dalam penyediaan kesehatan bagi masyarakat. Berbagai masalah dalam pelayanan di puskesmas seringkali dihubungkan dengan buruknya kinerja pegawai. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui besaran pengaruh kinerja pegawai terhadap peningkatan kualitas pelayanan di puskesmas. Metode penelitian kuantitatif dipilih untuk memudahkan melihat pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan. Responden penelitian terdiri dari 96 orang. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner dan diperkuat dengan data observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Sesuai hasil perhitungan SPSS, besaran pengaruh tersebut yaitu 92,3%. Indikator kinerja pegawai yang memiliki kontribusi besar yaitu kualitas kerja, dan hal ini berdampak positif terhadap tiga indikator pelayanan publik yaitu bukti langsung, keandalan dan jaminan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Puskesmas Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone telah membuat organisasi tersebut mendapatkan penilaian yang baik dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Kata kunci: Kinerja Pegawai; Kualitas Pelayanan; Puskesmas.

Fadhliah, Rizqy Alfiyaty, Kudratullah
Pengelolaan Program Vaksinasi Covid-19 oleh Humas Polda Provinsi Sulawesi Tengah

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 Juni 2023, Hal. 165-192

Program vaksinasi diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan virus Covid-19, mengendalikan kondisi masyarakat serta perekonomian negara. Target masyarakat yang telah divaksin secara nasional belum mencapai sasaran. Hal ini diakibatkan oleh maraknya berita hoax. Untuk itu diperlukan edukasi dan sosialisasi melalui pengelolaan komunikasi yang tepat oleh berbagai sektor, salah satunya pihak kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan program vaksinasi Covid-19 oleh Humas Polda Sulteng. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara kepada empat (4) informan dan observasi pada Bidang Humas (Bid Humas). Pengelolaan program vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan dapat dilihat melalui unsur-unsur manajemen komunikasi yang dimulai dari perencanaan berupa penentuan pemilihan komunikator yaitu Kapolda, Kabid Humas ataupun Kasatker (Kepala Satuan Kerja)

Pengemasan pesan dilakukan dengan upaya; (1) Menarik perhatian melalui meme viral, foto/gambar menarik, serta infografis terkait data; (2) Pemenuhan kebutuhan guna membangkitkan kebutuhan dengan informasi lengkap program vaksin (jadwal, lokasi, hal yang perlu diperhatikan); (3) Memberikan gambaran mengenai keuntungan dan kerugian sehingga masyarakat mau divaksin. Pemilihan media dilakukan sesuai dengan memperhatikan khalayak seperti Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Tribatanews, portal berita, media sosial (yaitu Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube), TVRI, radio dan surat kabar lokal, baliho dan spanduk. Koordinasi dilakukan antar tiga sub bidang yaitu PID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi), Multimedia dan PenMas (Penerangan Masyarakat) yang ada pada BidHumas. Kemudian pelaksanaan dilakukan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Terakhir, evaluasi belum dilakukan secara rutin sehingga diharapkan lebih konsisten dilakukan untuk mengukur efektivitas pesan dan media komunikasi. Hal ini bisa diupayakan melalui kerjasama penelitian dengan pihak universitas.

Kata Kunci: Manajemen Komunikasi, Program Vaksinasi Covid19, Kepolisian.

JURNAL
**ADMINISTRASI
PUBLIK**

PUSLATBANG KMP LAN RI

P-ISSN: 1858-2168

E-ISSN: 2621-251X

Volume XIX Nomor 1 June 2023

The abstract sheet may be reproduced/copied without permission or charge.

Noor Shifa Banon, Arenawati, Listyaningsih

The Effectiveness of the 112 Emergency Service Program in Handling Emergency Events

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 June 2023, Page 1-25

The 112 Emergency Service Program is an effort by the local government of Cilegon City to help accelerate the handling of emergency events experienced by people in the Cilegon City area. Seeing the potential for regional disasters such as natural, non-natural and social disasters that can occur in Cilegon City, the urgency of the 112 Emergency Service program is high enough to be implemented effectively. Even though the urgency of the 112 Emergency Service program is high, there are still obstacles in its implementation. This study will explain how much the effectiveness of the 112 Emergency Service program is in handling emergency events in the Cilegon City area using the Budiani emergency program effectiveness model analysis tool with a descriptive quantitative research method. The results of the study show that the implementation of the 112 Emergency Services program has been running effectively with an effectiveness rate of 80.08%. This value is obtained from the results of measuring the accuracy of the program target group's indicators that have reached the very effective category, the understanding of the program's target group has reached the very effective category, the achievement of program objectives has reached the effective category, and program follow-up has reached the effective category.

Keywords: Program Effectiveness; 112, Emergency, Call Center, Disaster

Kurnia Rheza Randy Adinegoro

Analysis of Digital Transformation of Land Public Services: Electronic Mortgage at Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 June 2023, Page 26-49

The development of technology and communication systems in the world is currently growing rapidly. This technological advancement brings various impact changes. All sectors in life are starting to be touched by digital transformation, both in the private sector and the public sector. One of the public sector service providers in the Land Administration, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has responded positively to digital transformation. This is realized by transforming land services, one of which is the transformation of Mortgage Registration which was previously carried out conventionally to be transformed electronically. The method used in this study is descriptive qualitative, this method is expected to be able to describe a point of view from the construction of reality that occurs in the field.

This study describes how changes in Mortgage Rights which were initially registered were conventionally transformed into electronic ones. Trying to give an overview of the differences from how to register to the output received in the form of a Mortgage certificate. In addition, it also tries to analyze changes in land public services with the dimensions of service quality using the E-S-Qual and E-Recs-Qual approaches. The E-S-Qual model includes Efficiency, System Availability, Fulfillment, Privacy variables. As well as the 3 dimensions of E-Recs-Qual namely Responsiveness, Compensation, and Contact.

Keywords: Digital Transformation, Land Public Services, Mortgage, Electronic Mortgage, Ministry Of Agrarian Affairs And Spatial Planning

Amin Irmawan

Local Government Efforts in Upholding ASN Discipline Case Study Wakatobi District Government

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 June 2023, Page 50-84

Eventhough a Government Regulation has been issued, violations of discipline and code of ethics by civil servants (PNS) still often occur in several government agencies, so until now it has not been fully resolved, as cases of violations and hedonistic attitudes by unscrupulous Civil Servants have received public attention so that they can damage the reputation of the institution and affect the public's trust in the government. This can happen to civil servants in the Wakatobi Regency Government.

This research focuses on the efforts of the local government to uphold the Civil Servant Discipline and Code of Ethics by Government Regulation Number 94 of 2021 relating to Civil Servant Discipline and Government Regulation Number 42 of 2004 concerning Corps Spirit Development and the Civil Servant Code of Ethics in realizing the Vision and Mission of the Wakatobi Regent in the 2021-2026 Wakatobi Regency RPJMD through the 2021-2026 Wakatobi Regency Personnel and Human Resource Development Agency Strategic Plan.

This research is qualitative research using Miles and Huberman's interactive analysis model. This analysis involves three main components, namely data collection, data reduction, and concluding/verification. The results showed that the discipline of Civil Servants is not only the responsibility of employees but also the responsibility of the organization, so the organization must establish a disciplinary policy action plan and code of ethics for Civil Servants by the Vision and Mission of the Regent and Deputy Regent of Wakatobi, namely 1) Conduct outreach meetings concerning controlling and supervising the discipline of Civil Servants, 2) Setting a good example, 3) Providing rewards and sanctions, 4) Employee training and development, 5) Creating a monitoring

system, 6) Reporting violations, 7) Providing facilities and infrastructure to improve performance employees, 8) Create a performance evaluation system.

Keywords: Discipline; Code of Ethics; Discipline Enforcement; Action Plan; Government Employees

Ihyani Malik, Nur Wahid, Busri

***Implementation of Agile Governance in Bureaucratic Reform 4.0
at the Puslatbang KMP LAN Makassar City***

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 June 2023, Page 85-119

This study aims to describe Bureaucratic Reform 4.0 based on the principles of Agile Governance at the Center for Government Management Training and Development and Studies (Puslatbang KMP) LAN Makassar City. The research method used is qualitative research by collecting data through observation, interviews, and document studies, which are then analyzed and visualized using the Nvivo 11 Plus software. The results of the study show that Agile Governance at the Center for KMP LAN Makassar City has been well implemented based on the principles of Agile Governance. The first principle is good enough governance; the implementation of bureaucratic reform 4.0 has adjusted the context and capabilities of the organization. The second principle is business-driven; the implementation of bureaucratic reform is highly process oriented. The third principle is human focused; bureaucratic reform has involved all employees and training participants to contribute. The next principle is based on Quick wins; innovations and activity programs in bureaucratic reform can be carried out quickly and achieve targets in annual Quick wins. Then systematic and adaptive approach; bureaucratic reform is carried out systematically, adaptively during the Covid-19 pandemic, measurable and can be assessed in monitoring and evaluation. The last principle is simple design and continuous refinement; the implementation of bureaucratic reform was carried out agilely and had improvements in 8 areas of change with the use of technology and the application of a dynamic work culture. So that bureaucratic reform can be a lever factor towards Agile Governance.

Keywords: Agile Governance, Bureaucratic Reform, Implementation

Ratna Siti Tursina, Oman Supriadi, Ipah Ema Jumiati

***Implementation Of the Covid-19 Vaccination Policy For The Elderly As An Effort To
Manage The Covid-19 Pandemic In Cilegon City***

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 June 2023, Page 120-145

The vaccination policy is the government's effort to deal with the Covid-19 pandemic, especially for the elderly who are vulnerable to transmission of the Covid-19 virus. Cilegon City has the least number of targets, but the coverage of Covid-19 vaccinations for the elderly in Cilegon City is still below the ideal target. This research will describe how the implementation of the Covid-19 vaccination policy for the elderly in Cilegon City, using the Van Meter and Van Horn theories and qualitative research methods. The data analysis used is the Miles and Huberman model. The results of the study show that the implementation of the Covid-19 vaccination policy for the elderly in Cilegon City has not

run optimally. Covid-19 vaccination coverage for the elderly is running slowly and has not yet reached the target. Resources are not sufficient, because not yet supported by completeness, availability of vaccine service rooms, and maintenance of the quality of the Covid-19 vaccine. The involvement of religious leaders as stakeholders has not been evenly distributed. Attitude the tendency of the executors is still lacking, seen from the discipline of the implementing staff in reporting. The lack of coordination between the City Health Office Cilegon and Community Health Centers, as well as on the environmental aspect, the effort to provide services with ball pick-up systems such as door-to-door vaccination is not optimal.

Keywords: Policy Implementation, Vaccination Covid-19, Elderly

Dewi Sulfa Saguni, Widyawati, Muhammad Hidayat Djabbari
Employee Performance in Improving Health Center Service Quality

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 June 2023, Page 146-164

The quality of post-pandemic health center services is still in the spotlight, this is because the health center is the front line in providing health for the community. Various problems in services at health centers are often associated with poor employee performance. This research is directed to determine the magnitude of the influence of employee performance on improving the quality of service at the health center. Quantitative research methods were chosen to make it easier to see the effect of employee performance on service quality. The research respondents consisted of 96 people. The data obtained from the results of the questionnaire and strengthened by observational data. The results of the study indicate that there is an influence of employee performance on the quality of public services. According to the SPSS calculation results, the magnitude of the influence is 92.3%. An employee performance indicator that has a major contribution is work quality, and this has a positive impact on three public service indicators, namely direct evidence, reliability, and guarantee of public services provided to the community. The capacity of human resources owned by the Puskesmas Biru, Tanete Riattang District, Bone Regency has made the organization get a good rating in providing services to the community.

Keywords: Employee Performance, Service Quality, Health Center.

Fadhliah, Rizqy Alfiyaty, Kudratullah
Management of the Covid-19 Vaccination Program by Public Relations of the Central Sulawesi Regional Police

Jurnal Administrasi Publik Volume XIX Nomor 1 June 2023, Page 165-192

The vaccination program is expected to reduce the growth rate of the Covid-19 virus, control the condition of society and the country's economy. The target of people who have been vaccinated nationally has not reached the target. This is caused by the rise of hoax news. For this reason, education and socialization are needed through proper communication management by various sectors, one of which is the police. This study aims to determine the management of the Covid 19 vaccination program by Central Sulawesi Regional Police Public Relations. The method used is descriptive qualitative by conducting interviews with four (4) informants and observations in the Public Relations Field (Bid Humas). The management of the Covid-19 vaccination program that has been carried out can be seen through elements of communication management starting from

planning in the form of determining the selection of communicators, namely the Regional Police Chief, Head of Public Relations or Head of Work Unit (Head of Work Unit). Message packaging is carried out with efforts; (1) Attract attention through viral memes, interesting photos/images, and data-related infographics; (2) Fulfillment of needs in order to generate needs with complete information on the vaccine program (schedule, location, things to pay attention to); (3) Provide an overview of the advantages and disadvantages so that people want to be vaccinated. The selection of media is carried out in accordance with audiences such as Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Fostering Community Security and Order), Tribunews, news portals, social media (namely Instagram, Facebook, Twitter and YouTube), TVRI, radio and local newspapers, billboards and banners. Coordination is carried out between three sub-sectors namely PID (Information and Documentation Management), Multimedia and PenMas (Public Information) in BidHumas. Then the implementation is carried out according to the previous plan. Lastly, evaluation has not been carried out routinely so it is hoped that it will be more consistent in measuring the effectiveness of messages and communication media. This can be pursued through research collaboration with universities.

Keywords: *Communication Management, Covid19 Vaccination Program, Police.*